

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 serta diselaraskan dengan Rancangan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2020.

Tahun 2020 merupakan **tahap ke-2** dengan fokus pada upaya mewujudkan **peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia**. Tahap ke-II menjadi tahapan penting untuk memantapkan langkah Jawa Tengah dalam mencapai target pembangunan jangka menengah, dengan mendasarkan pada hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2018 serta pengendalian pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan di Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan untuk mewujudkan arah kebijakan dan fokus pembangunan tahap ke-2. Selain itu, pembangunan ketahanan pangan difokuskan pada pembangunan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) untuk mewujudkan sistem logistik pangan yang terintegrasi, efektif dan efisien, menyediakan informasi stock pangan sehingga dapat meningkatkan stabilitas harga. Selain daripada itu, dalam rangka peningkatan pelayanan penjaminan mutu pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah meningkatkan kapasitas SDM tenaga Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan sarana prasarana serta kualitas laboratorium pengujian mutu pangan.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renja memuat prioritas program dan kegiatan, merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pangan dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan bersifat indikatif.

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan (1) *top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) *bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi; (3) partisipatif, pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; (4) politik, pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) teknokratik, pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah. Pendekatan yang berorientasi pada THIS dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu, implementasi *money follow priority programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja. Hal tersebut didukung dengan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu yang dituangkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.

Memperhatikan ketentuan proses penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah untuk mekanisme perencanaan pembangunan daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa tahapan dalam rangka penyusunan Renja : 1) penggalan masalah dan potensi; 2) pembahasan lingkup Dinas Ketahanan Pangan; 3) Pembahasan bersama pakar; 4) Verifikasi awal oleh Bappeda; 5) Forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
 34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja DISHANPAN Tahun 2020 disusun dengan maksud:

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah urusan pangan tahun 2020;
- b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah urusan pangan tahun 2020;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas untuk urusan pangan dalam rangka mencapai target Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk :

- a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2019;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2020;
- c. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.
- d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DISHANPAN Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Pangan

Bab ini memaparkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018; permasalahan pembangunan daerah; serta isu strategis pembangunan ketahanan pangan.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2020
Memuat telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja serta Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020

Bab IV. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
URUSAN PANGAN

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Tahun 2013 - 2018

Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah dilaksanakan 3 program yaitu : (1) Peningkatan Ketahanan Pangan; (2) Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan; serta (3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. Berdasarkan pada matrik pengukuran pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari DISHANPAN **dari 8 indikator kinerja outcome, 2 indikator tercapai 100%**, yaitu Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah dan Jumlah regulasi kedaulatan pangan. **Enam indikator melebihi target:** Ketersediaan pangan utama beras; Persentase penguatan cadangan pangan; Persentase penanganan daerah rawan pangan; Skor Pola Pangan Harapan dan Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

Realisasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 mengacu pada APBD 2018 secara terinci dituangkan pada Tabel 2.1. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2018 sebanyak 47 kegiatan. Realisasi kegiatan telah memenuhi target kinerja.

Keselarasan proses perencanaan dan penganggaran, pemantauan rutin mendorong tercapainya kinerja hasil/keluaran sesuai target. Adapun kinerja hasil/keluaran yang melebihi target antara lain dicapai karena adanya keberhasilan produksi padi (beras) yang mendapat dukungan pembiayaan APBN dan tingginya minat pengusaha pangan segar asal tumbuhan mengajukan proses pendaftaran registrasi pangan segar asal tumbuhan.

TABEL 2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD (Akhir Periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d Tahun 2017	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD 2018 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja 2018 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BKP Provinsi Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
3	Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya jaminan barang BKP Provinsi Jateng	Paket	5	4	1	1	100	5	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor/rumah dinas Sekretariat	Terpeliharanya kebersihan kantor	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat	Terpenuhinya alat tulis kantor bagi kegiatan BKP Provinsi Jateng selama 1 tahun terpenuhi	Bulan	60	48	12	12	100	60	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD (Akhir Periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d Tahun 2017	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD 2018 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja 2018 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan untuk administrasi kantor	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat	Terpenuhinya instalasi penerangan kantor BKP Provinsi Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat	Kebutuhan rumahtangga terpenuhi kantor	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat	Penyediaan bahan bacaan dan perundangan terpenuhi	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat	Kebutuhan makan dan minum kegiatan bagi tamu terpenuhi	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat	Terpenuhinya pelayanan perkantoran BKP Provinsi Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD (Akhir Periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d Tahun 2017	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD 2018 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja 2018 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018
13	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat	Terlaksananya publikasi ketahanan pangan	Paket	60	48	12	12	100	60	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat	Terpenuhinya operasional kebutuhan transportasi dinas	tahun	1	1		0	0	1	100
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat	Terpeliharanya gedung kantor BKP Prov. Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor BKP Jateng	Bulan	60	48	12	9	75	57	95
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat	Terpeliharanya meubelair kantor BKP Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD (Akhir Periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d Tahun 2017	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD 2018 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja 2018 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga BKP Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
19	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat	Terlaksananya pemeliharaan buku perpustakaan BKP Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
20	Kegiatan Peningkatan Sarana Aparatur Sekretariat	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor	Paket	3	2	1	1	100	3	100
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas	paket	4	3				3	75
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									
21	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
22	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat BCP	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Bulan	60	48	12	12	100	60	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD (Akhir Periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d Tahun 2017	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD 2018 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja 2018 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BCP	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik BCP	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
24	Penyediaan Alat Tulis Kantor BCP	Terpenuhinya Aalat tulis kantor Kegiatan BCP Prov. Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BCP	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan untuk administrasi, cetak plastik, karung kemasan cadangan pangan BCP Prov. Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
26	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BCP	Terpenuhinya instalasi penerangan kantor BCP Prov. Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
27	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BCP)	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor BCP Prov. Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
28	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BCP	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan kantor BCP Prov. Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD (Akhir Periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d Tahun 2017	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD 2018 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja 2018 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018
29	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BCP	Terpenuhinya kebutuhan makan minum kegiatan bagi pegawai BCP Prov. Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
30	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan perkantoran BCP Prov. Jateng	Bulan	24	12	12	12	100	24	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BCP	Terpeliharanya gedung kantor BCP Prov. Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BCP	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan RMU BCP Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
33	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BCP	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga BCP Jateng	Bulan	60	48	12	12	100	60	100
34	Peningkatan Sarana Aparatur dan Prasarana Kantor BCP	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor BCP	Paket	4	3	1	1	100	4	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD (Akhir Periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d Tahun 2017	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD 2018 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja 2018 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018
	Program Pendidikan Non Formal dan Informal									
	Kegiatan Pendidikan Masyarakat	Terselenggaranya Pelatihan Bagi Masyarakat	orang	3600	3600				3600	100
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan									
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	jumlah regulasi ketahanan pangan	regulasi	4	5	1	0	0	5	125
35	Kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan	jumlah regulasi ketahanan pangan	regulasi	1	0	1	1	100	1	100
		Terselenggaranya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Kali	2		2	2	100	2	100
	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	ketersediaan pangan beras	ton	5.816.198	6.770.549	-	0	0	6.770.549	116,41
36	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan	ketersediaan pangan beras	ton	5.816.198	0	5.816.198	6.897.339	118,58	6.897.339	118,58
37	Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Jumlah Desa Mandiri Pangan (baru)	desa	120	92	30	30	100	122	101,67

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD (Akhir Periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d Tahun 2017	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD 2018 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja 2018 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	60	87,5	60	100	166,67	100	166,67
38	Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan	Jumlah Kelompok Yang Difasilitasi	Kelompok	3	0	3	3	100	3	100
39	Kegiatan Fasilitas Lumbung Pangan Masyarakat	jumlah lumbung pangan masyarakat yang dikembangkan	lumbung pangan	160	120	40	40	100	160	100
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Terfasilitasinya tunda jual bahan pangan (gabah) dan sarana distribusi	Gapoktan/LDPM	232	232		0	0	232	100
40	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Penguatan Akses Pangan	Jumlah gapoktan yang difasilitasi	Gapoktan/LDPM	58	0	58	58	100	58	100
		Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	32	0	32	0	0	0	0
	Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	Informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis	kab/kota	35	35		0	0	35	100
41	Kegiatan Pemantauan Pasokan, Harga dan Stabilisasi Pangan Strategis	Informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis	kab/kota	35	0	35	35	100	35	100
42	Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	ton GKG	333	331	333	335	100,60	335	100,60

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD (Akhir Periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d Tahun 2017	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD 2018 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja 2018 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018
	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan									
43	Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah KWT pekarangan yang difasilitasi dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan yang B2SA	KWT pekarangan	550	472	120	120	100	592	107,64
44	Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KWT pengolah pangan alternatif yang difasilitasi dalam pengembangan pangan alternatif	Kelompok pengolah pangan alternatif	220	172	48	48	100	220	100
		Jumlah Promosi Pangan Alternatif	Kali	6		6	6	100,00	6	100
	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan									
45	Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pelaku/kelompok pangan segar yang terfasilitasi	kelompok/pelaku usaha	60	30	30	30	100	60	100
		Jumlah kantin sekolah yang difasilitasi	kantin sekolah	126	126		0	0	126	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD (Akhir Periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD s/d Tahun 2017	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD 2018 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja 2018 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018
		Jumlah Sampel Aman	&	80	91,43	80	96,93	121,16	121,16	151,453125
46	Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur Segar	Jumlah Sertifikasi Prima 3 dan Nomor Pendaftaran PSAT terhadap produk pangan segar	Sertifikat Prima 3	46	50	7	10	142,85	60	130,43
			Nomor Registrasi PSAT	125	160	32	83	259,375	243	194,4
47	Kegiatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Jumlah informasi keamanan pangan	kali	12	0	12	12	100	12	100
	Program Pengembangan Agribisnis									
	Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Usaha Agribisnis Pedesaan	Jumlah kawasan agribisnis yang difasilitasi	kawasan	12	0		-	-	-	-
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani									
	Kegiatan Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang difasilitasi	lumbung pangan	40	0		-	-	-	-

TABEL 2.1.a. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018 YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI	KETERANGAN
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

TABEL 2.1.b. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018 YANG TELAH MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI	KETERANGAN
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
1	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	
2	Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	

TABEL 2.1.c. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018 YANG MELEBIHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI	KETERANGAN
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
1	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	Ada peningkatan produksi padi (beras)	Ketersediaan beras meningkat	
2	Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Jumlah CPP yang dikelola semakin besar	Dapat memenuhi semua permintaan bantuan pangan yang diajukan untuk daerah rawan pangan (akibat bencana, kemiskinan, gagal panen)	
3	Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	Adanya stock cadangan pangan tahun sebelumnya	Jumlah CPP yang dikelola semakin besar	
4	Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	Konsistensi perencanaan dan penganggaran serta koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait	Fluktuasi harga pangan dapat diminimalkan (terutama untuk komoditas beras)	
II	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan			
1	Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI	KETERANGAN
		Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)		
III	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan			
1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Kesadaran produsen dan pedagang pangan segar asal tumbuhan terhadap keamanan pangan semakin baik	Meningkatnya keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat	
2	Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur Segar	Kesadaran pengusaha pangan segar mendapatkan registrasi pangan segar asal tumbuhan meningkat	Meningkatnya keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2013 – 2018

Pengukuran kinerja pelayanan DISHANPAN dilaksanakan melalui evaluasi kinerja Tahun 2013 – 2018. Hasil analisis tertuang pada Tabel 2.2. Berdasarkan data pada Tabel 2.2. dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari DISHANPAN dari seluruh indikator kinerja outcome tercapai sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik. Evaluasi kinerja pelayanan tersebut menjadi landasan bagi penyusunan Renja DISHANPAN Tahun 2020.

TABEL 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja RKPD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD		Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2018 (%)
		2017	2018	2017	2018			
1	Jumlah regulasi kedaulatan pangan	1	1	2	1	100,00	12	109,09
2	Ketersediaan pangan utama (ton beras)	5.816.193	5.816.193	6.770.549	6.897.339	118,59	6.897.339	118,59
3	Persentase Penguatan cadangan pangan	100	100	127,69	137,29	137,29	137,29	137,29
4	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100	100	100	100	100,00	100	100
5	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	60	60	87,5	100,00	166,67	166,67	166,67
6	Skor PPH	87	87	86,41	87,30	100,34	87,30	100,34
7	Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	80	80	91,43	96,93	121,16	96,93	121,16

1. Jumlah Regulasi Kedaulatan Pangan

Regulasi kedaulatan pangan yang telah disusun pada tahun 2018 adalah : Pergub 95/2018 Tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah. Penerapan jaminan mutu merupakan langkah penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan jaminan mutu, diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai alat bukti penerapan sistem manajemen mutu dan menjadi jaminan dapat diterimanya suatu produk pertanian baik di pasar domestik, regional maupun internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan daya saing produk dan nilai tambah/pendapatan yang akan memberikan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Regulasi tersebut meliputi Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu Pangan; Pembinaan terhadap Pelaku Usaha PSAT; dan Pengawasan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

2. Ketersediaan Pangan Utama Beras (Ton)

Capaian kinerja ini sebesar 118,59%, dengan realisasi ketersediaan pangan utama sebesar 6.897.339 ton beras dari target 5.816.198 ton, artinya ketersediaan pangan utama (beras) di Jawa Tengah dalam kondisi cukup bahkan surplus. Bila dibandingkan Tahun 2017 naik, capaian ketersediaan pangan utama Tahun 2017 sebesar 6.770.549 ton beras. Upaya pencapaian Sasaran 2 melalui pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat. Melalui kegiatan ini Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait guna mewujudkan pencapaian target ini. Koordinasi bukan hanya untuk pencapaian ketersediaan pangan utama saja, namun juga untuk ketersediaan bahan pangan lainnya (umbi-umbian, daging, susu, telur, ikan, sayur, gula, buah dan lain-lain). Dengan demikian

pangan yang tersedia di Jawa Tengah bukan hanya cukup namun juga beragam.

3. Persentase Penguatan Cadangan Pangan (%)

Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Cadangan Pangan (BCP), dibawah koordinator Dinas Ketahanan Pangan mengelola cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi penanganan rawan pangan transien maupun kronis. Pada Tahun 2018 BCP Provinsi Jawa Tengah mengelola sebanyak stock gabah 130,85 ton (setara beras 66,21 ton) dan stock beras 7,37 ton, Pengadaan tahun 2018 sebesar 335 ton GKG (setara beras 201). Total 274,58 ton ekuivalen beras. Jumlah Cadangan Pangan yang perlu disediakan Pemerintah Provinsi sebesar 200 Ton Ekuivalen Beras. Cadangan pangan dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan akibat gagal panen, bencana dan kemiskinan. Realisasi capaian kinerja sebesar 137,29% dari target 100%. Capaian kinerja 137,29% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 134,41%.

4. Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)

Informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi dan kabupaten kota untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan. Target komoditas yang dipantau sebanyak 7 komoditas meliputi beras, minyak goreng, cabai merah keriting, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi. Target lokasi 28 Kab/Kota dengan target waktu selama 52 minggu.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan terjangkau masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor, pemantauan dan rakor terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), selain itu juga dilaksanakan kegiatan padat karya pangan di 29 desa di 28 kab melalui pembangunan jalan desa. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dilaksanakan dengan memfasilitasi 58 gapoktan LDPM di 29 Kabupaten dalam bentuk gabah sebagai sarana tunda jual dan benih padi untuk 58 gapoktan.

5. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)

Penanganan daerah rawan pangan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan memperhatikan kejadian rawan pangan suatu daerah baik transien maupun kronis. Melalui Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah, selain pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan, Balai Cadangan Pangan menyalurkan cadangan pangan (gabah) untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga. Pada tahun 2018, dari 36 kejadian rawan pangan di 23 kabupaten/kota, dapat ditangani.

6. Skor PPH

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dari tahun 2014-2016 sudah hampir mendekati angka standar dan secara agregat skor

PPH sudah mencapai 91,8 di tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, skor PPH sebesar 86,41, lebih rendah dibandingkan capaian sebelumnya, karena terdapat perbedaan sumber data dalam metode penghitungan. Skor PPH Tahun 2018 meningkat menjadi 87,30.

Sesuai dengan arahan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, penghitungan skor PPH sebelum tahun 2016 menggunakan metode survei langsung sehingga diperoleh data primer. Sedangkan mulai tahun 2017, data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data Susenas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Di samping itu, tahun 2014 – 2016 standar konsumsi yang digunakan adalah sebesar 2.000 kkal/kapita/hari (sesuai dengan WNPG VIII, tahun 2004), dan pada tahun 2017-2018 menggunakan standar konsumsi 2.150 kkal/kapita/hari (sesuai dengan WNPG X, 2012).

7. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 memberikan amanat pada Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu (ayat 1) dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan (ayat 5). Selain itu, pada Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keamanan Pangan merupakan salah satu sub urusan pangan yang mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Realisasi indikator ini pada tahun 2018 sebesar 96,93% melebihi target 80% dan lebih tinggi dibanding tahun 2017 yaitu 91,43%. Tahun 2018, Dari 261 sampel pangan segar asal tumbuhan yang diuji (PSAT : 83, Prima 3 : 10, pangan segar 168), 253 aman dikonsumsi dan 8 terindikasi mengandung cemaran. Pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*Pre Market*)

Pengawasan ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir (Saat produksi, panen, grading, packing). Bentuk pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan mencakup : (i). Mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2, GAP, GHP (registrasi packing house/pendaftaran rumah kemas) dan (ii) Mekanisme Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan. Pengawasan dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Jawa Tengah pada tahun 2018 menerbitkan 10 sertifikat Prima 3 dan 83 sertifikat PSAT. Sampai dengan 2018 telah menerbitkan 83 sertifikat Prima 3; 1 sertifikat Prima 2; 335 Register Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); 96 *Health Certificate* dan 1 sertifikat *Packing House*.

b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (*Post Market*)

Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan diperedaran mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (*Good Ritel Practices*) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba patogen dan logam berat). Pengawasan keamanan pangan dilakukan oleh Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), dan tahun 2018 dilaksanakan pada 168 sampel

pangan segar dengan hasil uji lab 160 sampel pangan aman.

8. Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabai merah, bawang merah)

Stabilitas harga merupakan gambaran dari fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga selama kurun waktu tertentu. Fluktuasi harga diukur oleh besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil.

Capaian kinerja pada sasaran 8: Stabilitasnya harga pangan strategis, dengan CV beras dan CV bawang merah masing-masing sebesar 4,38% dan 20,18%, sesuai dengan target, sedangkan CV cabai merah sebesar 22,60%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran yaitu terbatasnya intervensi harga pangan pada ketiga komoditas tersebut baik dari segi jumlah maupun lokasi intervensi. Namun capaian tersebut telah menunjukkan bahwa harga pangan strategis relatif stabil, dan untuk untuk komoditas cabai merah jauh lebih stabil dibandingkan tahun 2017 (di atas 40%)..

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) diatur dengan Pergub Jateng Nomor 66 Tahun 2016, dan diubah dengan Pergub Jateng No. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016.

DISHANPAN mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah

mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pokok pembangunan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah adalah Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, yang diindikasikan dengan belum idealnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh permasalahan pada setiap aspek ketahanan pangan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan energi dan protein.
2. Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah.
3. Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.
4. Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat,
5. Perlunya jaminan mutu pada pangan segar asal tumbuhan (untuk peningkatan keamanan pangan dan nilai tambah daya saing produk).

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Jawa Tengah surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stock beras.

Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran

masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi dan Sistem Logistik Daerah

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah.

5. Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

6. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar..

Peningkatan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pangan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain :

1. Perubahan Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam,

- perubahan keanekaragaman hayati, eksplosif hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.
2. **Penanganan Kerawanan Pangan**

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.
 3. **Perekonomian Global dan Pasar Bebas**

Situasi perekonomian global salah satunya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pangan sehingga berdampak terhadap ketahanan pangan global yang dapat berimbas kepada ketahanan pangan daerah. Krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir menyebabkan kelangkaan pangan di pasar global yang mempengaruhi peningkatan harga pangan di dalam negeri. Untuk mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, Provinsi Jawa Tengah harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Berdasarkan situasi tersebut, kebijakan meningkatkan produksi pangan dalam negeri menjadi mutlak dilakukan.

Selain perekonomian global, ketahanan pangan Jawa Tengah juga dihadapkan pada tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas. Pemberlakuan pasar bebas memberikan peluang bagi produk pangan Jawa Tengah untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Sebaliknya, penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Peningkatan daya saing produk pangan domestik dan penguatan kapasitas sumberdaya pangan sangat diperlukan menghadapi pasar bebas .
 4. **Permasalahan Gizi (Malnutrition)**

Peningkatan pendapatan terutama pada masyarakat perkotaan (urban) telah mengubah pada gaya hidup terutama pola makan. Telah terjadi perubahan konsumsi dari tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat dan rendah lemak menjadi karbohidrat sederhana, rendah serat dan tinggi lemak. Perubahan tersebut terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Selain diet yang tidak seimbang, aktivitas fisik rendah juga menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan overweight dan obesitas.
 5. **Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

UU 23/2014 mengamanatkan pada Pemerintah Provinsi dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan

dan harga pangan. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar Jawa Tengah akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

6. Kebutuhan Pangan untuk Kesehatan

Masyarakat modern yang peduli kesehatan menuntut makanannya setelah berfungsi sebagai pemasok zat-zat gizi dan cita rasa memuaskan, harus berfungsi menjaga kesehatan dan kebugaran. Kualitas sensoris, gizi, serta keamanan pangan tak luput dari pemenuhan selera gizi masyarakat. Tantangan industri pangan tidak jauh dari pemenuhan kemampuan gizi konsumen. Hal ini karena untuk memperoleh produk pangan yang bermutu baik dan terjamin bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerangan pengendalian dan pengawasan dalam sistem jaminan mutu.

7. Jaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Diterbitkannya Permentan Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan melalui OKKP-D dan Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dalam hal sertifikasi jaminan mutu pangan, baik dalam hal sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas.

Selain tantangan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa peluang yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan urusan pangan, yaitu :

1. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Jawa Tengah
2. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
3. Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
4. Jawa Tengah memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
5. Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejak awal ditetapkannya Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dengan dibandingkan Analisis Kebutuhan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 masih membutuhkan tambahan anggaran pada beberapa kegiatan. Secara rinci pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. 000)	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Provinsi Jawa Tengah	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas (kkal/kap/hari)	4.000	28.070.000	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Provinsi Jawa Tengah	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas (kkal/kap/hari)	4.000	29.770.000	Penambahan pada : 1. Pendataan Rantai Pasok dan Penggilingan (Rp. 500 juta) 2. Model Percontohan Pekarangan 4 paket Rp. 200 juta 3. Pengembangan Laboratorium Balai Mutu Peningkatan Keamanan Pangan Rp. 1 M.
			Ketersediaan Protein Pangan beragam dan berkualitas (gr/kap/hari)	107				Ketersediaan Protein Pangan beragam dan berkualitas (gr/kap/hari)	107		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN	
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. 000)
			Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)	85				Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)	85		
			CV Harga Pangan Strategis (beras, cabai, bawang merah)	beras ≤ 5%; cabai ≤ 44%; bw. merah ≤ 29%				CV Harga Pangan Strategis (beras, cabai, bawang merah)	beras ≤ 5%; cabai ≤ 44%; bw. merah ≤ 29%		
			Rasio Cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	0,44				Rasio Cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	0,44		
			Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola (%)	100				Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola (%)	100		
			Rasio Konsumsi Pangan Lokal	0,11				Rasio Konsumsi Pangan Lokal	0,11		
			Konsumsi beras (kg/kap/th)	99,1				Konsumsi beras (kg/kap/th)	99,1		
			Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (kg/kap/th)	83				Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (kg/kap/th)	83		
			Konsumsi kelompok pangan Hewani (kg/kap/th)	30				Konsumsi kelompok pangan Hewani (kg/kap/th)	30		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. 000)	
			Persentase keamanan pangan segar (%)	90				Persentase keamanan pangan segar (%)	90		
			Persentase Jaminan Mutu Pangan Yang Diterbitkan(%)	80				Persentase Jaminan Mutu Pangan Yang Diterbitkan(%)	80		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	70	5.271.500	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	70	5.871.500	Penambahan Anggaran pada : 1. Rehab Gedung Rp. 500 juta 2. Publikasi, Informasi 4 paket Rp. 100 juta
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP PD	80	850.000	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP PD	80	950.000	Penambahan Anggaran pada : 1. Penyusunan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Rp. 100 juta

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu dasar penetapan alokasi kegiatan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, adalah usulan dari masyarakat melalui Musrenbang dan usulan sektoral pangan dari kabupaten/kota.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan Ketahanan Pangan/ Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA	Banjarnegara : - Desa Punggelan, Punggelan; - Desa Bawang, Bawang; - Kelurahan Kuta, Banjarnegara, - Desa Purwonegoro, Purwanegara; - Desa Sigaluh, Sigaluh	Jumlah kelompok penerima Stimulan benih/bibit tanaman, ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan	5 kelompok	Sesuai dengan peruntukan kegiatan, perlu verifikasi lebih lanjut.
		Sukoharjo : - Desa Mojorejo, Bendosari - Kelurahan Dukuh, Sukoharjo - Desa Gadingan, Mojolaban - Desa Mranggen, Polokarto	Jumlah kelompok penerima Stimulan benih/bibit tanaman, ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan	4 kelompok	Sesuai dengan peruntukan kegiatan, perlu verifikasi lebih lanjut.
2	Peningkatan Ketahanan Pangan/ Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Banjarnegara: - Desa Madukara, Madukara; - Desa Bawang, Bawang; - Desa Sigaluh, Sigaluh; - Desa Banjarmangu, Banjarmangu; - Desa Rakit, Rakit	Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi	5 kelompok	Sesuai dengan peruntukan kegiatan, perlu verifikasi lebih lanjut (dalam 1 tahun tiap kelompok hanya menerima 1 jenis bantuan)
		Sukoharjo : - Desa Puron, Bulu - Desa Tepisari, Polokarto	Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi	2 kelompok	Sesuai dengan peruntukan kegiatan, perlu verifikasi lebih lanjut.
3	Peningkatan Ketahanan Pangan/ Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan	Sukoharjo : - Desa Lorog, Tawangsari - Desa Pranan, Polokarto	Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan	2 gapoktan	Sesuai dengan peruntukan kegiatan, perlu verifikasi lebih lanjut.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)		Masyarakat (gapoktan)		
		Kendal : - Desa Sedayu, Gemuh, Gapoktan Sedayu Makmur	Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan)	1 gapoktan	Sesuai dengan peruntukan kegiatan, perlu verifikasi lebih lanjut.
4	Peningkatan Ketahanan Pangan/ Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Sukoharjo : - Desa Karangwuni, Weru; - Desa Karangasem, Bulu; - Desa Ngasinan, Bulu - Desa Kunden, Bulu; - Desa Karang Tengah, Weru	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi	5 kelompok	Sesuai dengan peruntukan kegiatan, perlu verifikasi lebih lanjut.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Tema RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” untuk menuju Visi “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Pembangunan Nasional diarahkan pada : 1) Pembangunan Manusia; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Kewilayahan; 4) Pembangunan Infrastruktur; dan Pembangunan Politik. Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Penyusunan program dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *money follow program*.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan
Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatkan ketahanan pangan, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, yaitu Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas dengan indikator sasaran PPH Ketersediaan dan Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi dan Angka Konsumsi Protein)

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1. TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN URUSAN PANGAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2020
1	Meningkatkan ketahanan pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	87,72
		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	1. Skor PPH Ketersediaan	Angka	82,75
			2. Angka Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	2150
			3. Angka Konsumsi Protein	Gram//kapita/hari	57

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh DISHANPAN pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pangan).

4.1. Rencana Program

Pemantapan ketahanan pangan di Jawa Tengah Tahun 2020, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Renstra DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, program dimaksud adalah:

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- b. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah; dan
- c. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

4.2. Kegiatan

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pagu Anggaran Indikatif DISHANPAN Tahun 2020 sebesar Rp. 34.191.500.000 Kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 28.070.000.000,-, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan
 - b. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan
 - c. Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat
 - d. Kegiatan Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan
 - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)
 - f. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
 - g. Kegiatan Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA

- h. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
 - i. Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - j. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
 - k. Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan
 - l. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan
 - m. Kegiatan Pengujian Mutu Pangan
 - n. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan
- 2) Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 5.271.500.000, terdiri dari :
- a. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
 - f. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 - g. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 - h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
 - i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
 - j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
 - k. Kegiatan Penyediaan Saranan dan Prasarana Kantor
 - l. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
 - m. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - n. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
 - o. Kegiatan Penyediaan Pendukung Peralatan Perkantoran
 - p. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 850.000.000,- terdiri dari :
- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program		Keluaran			Hasil			
				Satuan	Volume	Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
								Satuan	Volume					Satuan	Volume			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	NON URUSAN																	
0.00	NON URUSAN																	
0.00.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah													5.271.500.000		4.245.150		Dinas Ketahanan Pangan
0.00.01.001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00	40.000.000	12 Bulan	33.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00	75.000.000	12 Bulan	75.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan									Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian	100.00.00	6.000.000	12 Bulan	6.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Tata Usaha

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Perangkat Daerah									dan Kearsipan Perangkat Daerah		dan keuangan perangkat daerah						
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	135.000.000	12 Bulan	135.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Tata Usaha
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	265.000.000	12 Bulan	275.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah									Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	1 Tahun	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	100.000.000	1 Tahun	85.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah									Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	1 Tahun	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	40.000.000	1 Tahun	40.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Tata Usaha

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	150.000.000	12 Bulan	78.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Tata Usaha
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	1.300.000.000	12 Bulan	1.250.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	800.000.000	12 Bulan	900.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Keuangan
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	38.000.000	12 Bulan	42.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Tata Usaha
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum									Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum,	100.00.000	8.500.000	12 Bulan	8.250	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Tata Usaha

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Rapat Perangkat Daerah									Minum Rapat Perangkat Daerah		kepegawaian dan keuangan perangkat daerah						
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00	50.000.000	12 Bulan	34.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Keuangan
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah									Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00	5.000.000	12 Bulan	5.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Tata Usaha
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah									Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00	30.000.000	12 Bulan	19.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan									Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.000	550.000.000	12 Bulan	440.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Dinas/Operasional Perangkat Daerah									Dinas/Operasional Perangkat Daerah								
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00. %	100.000.000	12 Bulan	50.000	Opd Provinsi; Semarang	
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah									Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00. %	320.000.000	12 Bulan	350.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor									Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	5 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00. %	70.000.000	5 Unit	75.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Tata Usaha
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan									Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana	6 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum,	100.00. %	50.000.000	6 Unit	50.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Satuan	Volume	Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
								Satuan	Volume					Satuan	Volume			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Prasarana Kantor									kantor perangkat daerah		kepegawaian dan keuangan perangkat daerah						
0.00.01.012	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah									Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	2 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00	890.000.000	2 Unit	100.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
0.00.01.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal									Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	30 Orang	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00	100.000.000	30 Orang	60.500	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
0.00.01.016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah									Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00	44.000.000	12 Bulan	48.400	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
0.00.01.020	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran									Jumlah bulan tersedianya sarana pelengkap pendukung perkantoran	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00	50.000.000	12 Bulan	26.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Tata Usaha

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0.00.01.023	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah									Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00.00	55.000.000	12 Bulan	60.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
0.00.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													850.000.000		940.000		Dinas Ketahanan Pangan
0.00.02.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100.00.00	425.000.000	2 Dokumen	470.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Program
0.00.02.002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100.00.00	425.000.000	2 Dokumen	470.000	Opd Provinsi; Semarang	Sub Bagian Program
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
2.03	PANGAN																	
2.03.15	Peningkatan Ketahanan Pangan													28.070.000.000		28.820.000		Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Satuan	Volume	Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
								Satuan	Volume					Satuan	Volume			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.03.15.003	Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan									Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center	1 Unit	CV harga pangan strategis beras	5.00. %	100.000.000	1 Unit	250.000	Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan; SEMARANG	SEKSI HARGA PANGAN
										Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah)	5 Kali			900.000.000	5 Kali	1.000.000		
2.03.15.005	Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA									1. Jumlah kelompok penerima Stimulan benih/bibit tanaman, ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan	130 Kelompok	Rasio konsumsi pangan lokal	0.12. Angka	1.600.000.000	135 Kelompok	1.800.000	Bidang Konsumsi Dan Pengankaragaman Pangan; TEMANGGUNG; CILACAP; SRAGEN; REMBANG; KOTA SEMARANG; KENDAL; BANYUMAS; KUDUS; WONOSOBO; KOTA MAGELANG; KEBUMEN; JEPARA; SEMARANG; MAGELANG; KOTA SALATIGA; KOTA SURAKARTA; KOTA TEGAL; PEMALANG; PURBALINGGA;	SEKSI KONSUMSI PANGAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Satuan	Volume	Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
								Satuan	Volume					Satuan	Volume			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	KARANGANYAR; PEKALONGAN; BLORA; PATI; KLATEN; BATANG; BANJARNEGARA; DEMAK; WONOGIRI; KOTA PEKALONGAN; TEGAL; BOYOLALI; PURWOREJO; BREBES; GROBOGAN; SUKOHARJO	
										Analisa PPH	1 Laporan			300.000.000	1 Laporan	50.000		
										Jumlah sekolah penerima Stimulan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan	14 Paket			300.000.000	16 Paket	350.000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Satuan	Volume	Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
								Satuan	Volume					Satuan	Volume			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.03.15.006	Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal									Data potensi pangan lokal	1 Buku	Rasio konsumsi pangan lokal	0.12.Angka	35.000.000	1 Buku	35.000	Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan; BOYOLALI; WONOSOBO; SRAGEN; KUDUS; JEPARA; PEMALANG; KOTA MAGELANG; BATANG; SUKOHARJO; WONOGIRI; KLATEN; BREBES; TEMANGGUNG; PATI; KEBUMEN; KOTA SALATIGA; CILACAP; DEMAK; KENDAL; BANYUMAS; KOTA TEGAL; KOTA SURAKARTA; KARANGANYAR; MAGELANG; PEKALONGAN; GROBOGAN; BANJARNEGARA; BLORA; PURBALINGGA; KOTA	SEKSI PENGEMANGAN PANGAN LOKAL

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Satuan	Volume	Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
								Satuan	Volume					Satuan	Volume			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	SEMARANG; TEGAL; KOTA PEKALONGAN; PURWOREJO; SEMARANG; REMBANG	
										Jumlah kelompok pengembang pangan pokok lokal yang difasilitasi	2 Kelompok			180.000.000	2 Kelompok	200.000		
										Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi	55 Kelompok			785.000.000	60 Kelompok	835.000		
2.03.15.007	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan									Jumlah Promosi Pangan B2SA yang dilaksanakan	8 Kali	Rasio konsumsi pangan lokal	0.12. Angka	1.745.000.000	9 Kali	2.150.000	Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan; SEMARANG	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
2.03.15.008	Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan									Jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan	12 Dokumen	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	90.00. %	470.000.000	12 Dokumen	525.000	Bidang Keamanan Pangan; Semarang	Seksi Kerjasama Dan Informasi Keamanan Pangan

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Satuan	Volume	Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
								Satuan	Volume					Satuan	Volume			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	600 Orang			675.000.000	600 Orang	325.000		
2.03.15.009	Pengawasan Keamanan Pangan									Jumlah sampel pangan segar yang diawasi (Kualitatif)	500 sampel	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	90.00. %	900.000.000	500 sampel	950.000	Bidang Keamanan Pangan; Semarang	Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
										Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	12 Dokumen			50.000.000	12 Dokumen	50.000		
2.03.15.010	Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan									Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan	40 Kelompok	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	90.00. %	900.000.000	45 Kelompok	950.000	Bidang Keamanan Pangan; Sukoharjo; Purworejo; Pemalang; Kebumen; Grobogan; Karanganyar; Tegal; Semarang; Klaten; Cilacap; Kudus; Pekalongan; Banyumas; Batang; Rembang; Brebes; Kendal	Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan
2.03.15.011	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan									Jumlah desa yg diberdayakan sbg upaya penanganan kerawanan pangan	34 Desa	Ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas	107.20.Gram/kapita /hari	3.900.000.000	34 Desa	4.000.000	Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan ; SRAGEN; KLATEN;	SEKSI KERAWANAN PANGAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Satuan	Volume	Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
								Satuan	Volume					Satuan	Volume			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pangan di Masyarakat																WONOSOBO; GROBOGAN; BANJARNEGARA; DEMAK; BANYUMAS; REMBANG; SEMARANG; PEMALANG	
										Peta SKPG dan atau FSVA	1 Laporan			300.000.000	2 Laporan	250.000		
2.03.15.012	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat									Jumlah CPP yang disediakan (beras)	200 Ton	Persentase cadangan pangan yang dikelola	100.00. %	2.600.000.000	200 Ton	2.600.000	Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan; BANJARNEGARA; JEPARA; PEKALONGAN; KEBUMEN; PURBALINGGA; KARANGANYAR; SRAGEN; MAGELANG; KLATEN; WONOGIRI; SEMARANG; PURWOREJO; PATI; BLORA; GROBOGAN; TEMANGGUNG; PEMALANG; BATANG	SEKSI CADANGAN PANGAN
										Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi	80 Unit			1.100.000.000	120 Unit	1.300.000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.03.15.014	Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan									Jumlah sertifikat yang diterbitkan	7 Sertifikat	Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan	80.00. %	500.000.000	7 Sertifikat	500.000	Balai Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan; SEMARANG	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN
										Jumlah register yang diterbitkan	52 Sertifikat			700.000.000	53 Sertifikat	700.000		
										Jaminan mutu pangan lainnya	7 Sertifikat			1.250.000.000	8 Sertifikat	1.300.000		
										Surveilan jaminan mutu pangan	18 Kelompok			500.000.000	20 Kelompok	500.000		
2.03.15.015	Pengujian Mutu Pangan									Jumlah sampel pangan yang diuji	75 sampel	Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan	80.00. %	1.285.000.000	75 sampel	1.425.000	Balai Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan; SEMARANG	SEKSI PENGUJIAN MUTU PANGAN
										Jumlah rekomendasi hasil uji	75 Dokumen			70.000.000	75 Dokumen	75.000		
2.03.15.016	Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan									Jumlah rekomendasi yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas	4005.00.kkal/kapita/hari	600.000.000	1 Laporan	450.000	Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan ; SEMARANG	SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN
2.03.15.017	Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan									Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan umbi-umbian	5 Kelompok	Ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas	107.20.Gram/kapita/hari	500.000.000	5 Kelompok	315.000	Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan ; SEMARANG; PEMALANG; BANJARNEGARA; KLATEN;	SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			
				Satuan	Volume	Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
								Satuan	Volume					Satuan	Volume			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	SRAGEN; REMBANG	
										Jumlah dokumen data KP2LB/LP2B	1 Dokumen			25.000.000	1 Dokumen	35.000		
2.03.15.018	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)									Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah	1 Laporan	CV harga pangan strategis beras	5.00.%	5.000.000.000	1 Laporan	5.000.000	Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan; BANJARNEGARA; PATI; MAGELANG; BOYOLALI; PEKALONGAN; KUDUS; PURBALINGGA; SRAGEN; KEBUMEN; KOTA MAGELANG; KLATEN; BATANG; CILACAP; WONOSOBO; KENDAL; KOTA SALATIGA; SUKOHARJO; BANYUMAS; BLORA; DEMAK; WONOGIRI; TEMANGGUNG; PEMALANG; JEPARA; SEMARANG; GROBOGAN; KARANGANYAR;	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab/ Unit Kerja	
						Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Target			Rp. (000)
				Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp. (000)			
					Satuan	Volume		Satuan	Volume										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
																	REMBANG; PURWOREJO; BREBES; KOTA SEMARANG; TEGAL		
										Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan)	70 Kelompok			800.000.000	105 Kelompok	900.000			
										Promosi Produk Pertanian	0 Kali			0	0 Kali				
Total													34.191.500.000		34.005.150				

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan penjabaran proses pencapaian tujuan dinas ketahanan pangan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, serta dengan penggalian masalah dan potensi-potensi yang ada dengan mendasarkan pada metode pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk pengembangan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renja memuat prioritas program dan kegiatan, merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pangan dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Renja dijadikan sebagai pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renja merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan tahunan. Pada perjalanannya Renja Dinas Ketahanan Pangan dapat direview, jika target kinerja sudah terlampaui.